Padang Ekspres
SENIN ■ 12 FEBRUARI 2018

Jokowi dan Minang

KUNJUNGAN Presiden Joko Widodo dalam rombongan besar ke Sumbar pada 7-9 Februari 2018 lalu merupakan kunjungan terlama di ranah Minang sejak menjabat sebagai RI-1. Pada tahun 2015 dan 2016, Jokowi hanya kunjungan singkat (sehari) saja di Sumbar.

Israr Iskandar
Dosen Jurusan Sejarah FIB Unand

Sambutan masyarakat Sumbar kali ini mungkin juga terbilang luar biasa. Gaya sederhana Jokowi, mulai menginap di hotel murah, membagikan berbagai program bantuan pemerintah, hingga meninjau program pemberdayaan masyarakat dengan metode *blusukan*, mendapat respons antusias masyarakat (*detik.com*).

Secara politik, kunjungan Jokowi ini tentu memiliki makna tertentu. Apalagi adanya peresmian dimulainya proyek tol Padang-Pekanbaru, revitalisasi Saribu Rumah Gadang, apresiasi terhadap tokoh pers Adinegoro sekaligus pembangunan muesum, menghadiri puncak HPN, dan beberapa kegiatan lainnya. Ini jelas akan memberikan makna politik khusus bagi Jokowi di Sumbar, daerah yang pada Pilpres 2014 lalu justru dimenangkan telak pasangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Catatan sejarah

Meski sejumlah lembaga survei memprediksi Jokowi berpeluang memenangkan (kembali) Pilpres 2019 nanti, tapi proyeksi hasil pilpres di tingkat Sumbar tetap akan amat menarik dicermati. Apakah Jokowi akan berhasil menembus "zona merah" ini pada Pilpres nanti?

Jawabannya tidak hanya tergantung pada siapa tokoh yang akan menjadi lawan politik Jokowi dan dengan siapa pula ia nanti akan berpasangan, tapi sejauh mana persepsi pemilih atas kinerja Jokowi selama lima tahun ini.

Survei SMRC awal Januari lalu menunjukkan, dukungan (semi terbuka) orang Minang pada Jokowi sudah melampaui Prabowo sendiri. Sejauh ini memang yang sering dirujuk adalah suatu pandangan spekulatif, bahwa akseptabilitas Jokowi akan tetap rendah di Sumbar, karena penyokong utamanya adalah PDIP, yang tidak punya basis kuat di daerah ini. PDIP (dalam batas tertentu) dianggap sebagai "reinkarnasi" PNI, partai besutan Proklamator dan Presiden pertama, Soekarno.

Sejarah mencatat, pada Pemilu 1955, PNI hanya memperoleh 1 persen suara di Sumbar. Bandingkan partai-partai Islam; Masyumi 49 persen, Perti 28 persen, dan PSII 3 persen. PKI bahkan mendapatkan 7 persen di Sumbar (Zed *et al*, 1995). Artinya, pada dekade 1950-an (bahkan kemudian dekade 1960-an, khususnya pasca-PRRI), politik berhaluan "Soekarnoisme" tidak populer di tanah Minang.

Pada era Orde Baru, proyek "deidiologisasi" politik rezim Soeharto membuat PNI dan eks parpol lama lainnya kian terpuruk, sementara partai besutan pemerintah, Golkar, makin berjaya. Suara PNI dalam Pemilu 1971 dan suara PDI (PNI berfusi di dalamnya) pada lima pemilu Orde Baru berikutnya kalah telak dari Golkar maupun PPP.

Barulah pada Pemilu 1999 yang bebas, pasca-kejatuhan rezim Soeharto, kaum "Soekarnois plus" bangkit dan meraih sukses besar: PDIP tampil sebagai pemenang. Namun demikian, di Sumbar, partai pimpinan Megawati Soekarnoputri ini tetap kurang populer: kalah jauh dari Golkar maupun partai-partai bebasis massa Islam.

Ketika Pilpres langsung pertama digelar tahun 2004, PDIP mengusung Megawati, sebagai petahana, tetapi kalah. Di Sumputaran final Pilpres yang mempertemukan Susilo Bambang Yudhoyono-Jusuf Kalla dan Megawati-Hasyim Muzadi, pasangan PDIP ini hanya meraih 16 persen di Sumbar. Sedangkan SBY-JK 84 persen.

Saat Pilpres 2009, Megawati yang berpasangan dengan pemimpin Gerindra Prabowo Subianto, kembali terpuruk di Sumbar. Di daerah ini pemenangnya adalah SBY-Boediono yang meraih 79,91 persen, disusul JK-Wiranto 14,2 persen dan Megawati-Prabowo 5,9 persen. Pada masa ini secara nasional popularitas SBY sebagai *petahana* memang sedang "di atas langit" sehingga terpilih dengan mulus untuk periode kedua.

Pada Pilpres 2014, PDIP (bersama KIB) mengusung figur baru, yakni Jokowi yang dipasangkan dengan JK, tokoh Golkar dari Indonesia timur. Duet ini berhasil keluar sebagai pemenang. Namun di Sumbar pasangan ini kalah, walaupun JK notabene *sumando* orang Sumbar. Jokowi-JK hanya meraih 23,08 persen, sementara Prabowo-Hatta 76,92 persen.

Ada beberapa hal menarik dari hasil Pilpres 2014 di Sumbar. Antara lain, bahwa walaupun PDIP merupakan terbesar di tingkat nasional, namun di Sumbar partai banteng ini tetap tergolong partai "gurem", seperti halnya PNI atau PDI di masa lalu. Capres yang diusung PDIP sejauh ini tetap kurang populer di Sumbar, apalagi jika lawan politiknya diusung partai yang memang memiliki basis kuat di daerah ini.

Namun demikian, jika dicermati lagi, apa yang dicapai Jokowi-JK di Sumbar pada 2014 tetap sangat signifikan. Walaupun di Sumbar Jokowi-JK kalah dari Prabowo-Hatta, tetapi raihan suara pasangan ini sebenarnya lebih tinggi dibandingkan perolehan suara Mega-Hasyim pada 2004 maupun Mega-Prabowo pada 2009. Perolehan 23 persen pada 2014 menegaskan bahwa Jokowi berhasil "melampaui" PDIP maupun Megawati itu sendiri.

Bagaimana tendensi 2019 nanti? Politik tentu bersifat dinamis. Selain faktor siapa pasangan cawapresnya, partai pengusung dan juga lawan tanding yang dihadapi, tapi juga tentu saja faktor kinerja Jokowi-JK sendiri, khususnya terkait kepentingan rakyat di Sumbar. (*)

Scanned by CamScanner